**Penanaman Nilai Kewirausahaan bagi Anak Usia Dini
melalui Pembelajaran Ekonomi Kreatif**
*Planting Entrepreneurial Values for Early Childhood
through Creative Economy Learning*

Aminatus Zahriyah¹

¹Universitas Islam Negeri Khas Jember
e-mail: aminatus.ria23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis cara menanamkan nilai kewirausahaan bagi anak usia dini melalui pembelajaran ekonomi kreatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan analisis kualitatif melalui proses critical review terhadap menguatnya prinsip penanaman nilai kewirausahaan sejak usia dini melalui pembelajaran ekonomi kreatif. Saat ini Keberadaan ekonomi kreatif ditandai dengan bertumbuhnya lembaga-lembaga keuangan Syari'ah, seperti Perbankan Syari'ah, dan Industri Keuangan Syari'ah NonBank (IKNB). Berkembangnya ekonomi Syari'ah sebagai suatu preferensi perilaku ekonomi masyarakat muslim di Indonesia menunjukkan bahwa adanya prinsip penanaman sejak usia dini, memberi motivasi, persepsi dan kepercayaan atas hal tersebut. Hasil penelitian didapatkan bahwa melalui pembelajaran ekonomi kreatif bagi anak usia dini membuat prinsip dasar yang mengajarkan anak tentang nilai-nilai kewirausahaan. Selain itu anak-anak dilatih kemandirian bidang ekonomi agar nantinya bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi entrepreneurship.

Kata Kunci; *Ekonomi Kreatif; Nilai Kewirausahaan; Penanaman.*

ABSTRACT

This study aims to analyze how to instill entrepreneurial values in early childhood through creative economic learning. The research method used is a qualitative analysis approach through a qualitative review process on strengthening the principle of instilling entrepreneurial values from an early age through learning the creative economy. Currently, the existence of the creative economy is marked by the growth of Islamic financial institutions, such as Islamic Banking, and the Non-Bank Islamic Financial Industry (IKNB). The development of the Sharia economy as a preference for the economic behavior of Muslim communities in Indonesia shows that there is a principle of inculcation from an early age, providing motivation, perception, and belief in this matter. The results of the study found that through creative economic learning for early childhood, basic principles are created that teach children about entrepreneurial values. In addition, children are trained to be independent in the economic field so that later they can grow and develop into entrepreneurship.

Keywords; *Creative Economy; Entrepreneurial Value; Planting.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai suatu negara yang merupakan penduduk penganut agama Islam terbesar di dunia, berpeluang menjadi negara yang mengembangkan nilai aset ekonomi syari'ah tertinggi di dunia (Mardi, 2021). Studi tentang ekonomi syari'ah cukup lama dan kehadiran sistem ekonomi tersebut bukan disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Ekonomi syari'ah tersebut bersumber dari nilai nilai Islam itu sendiri. Hukum ekonomi syari'ah ini pada konteks yang lebih makro pernah diterapkan dan sebagian masih berlaku sampai saat ini (Mardi, 2021). Perwujudan hukum nasional yang berlandaskan ajaran prinsip syari'ah tidak dapat dilepaskan dalam konteks hukum nasional. Menurut Ramadhan (2018) mengingat Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki komunitas muslim terbanyak di dunia, maka pentingnya pendalaman menguatnya sistem ekonomi syari'ah dalam berbagai konteks bisnis dirasa sangat penting, sehingga pembahasan tentang preferensi masyarakat terkait adanya ekonomi syari'ah selalu penting dan aktual khususnya mengetahui kekuatan psikologis dari masyarakat itu sendiri terhadap makna dari nilai ekonomi syari'ah (Astuti, 2018).

Menurut Rustandi *et al.*, (2021) penerapan kebijakan ekonomi syari'ah di Indonesia tentunya tidak dapat berjalan mulus dalam prosesnya, tetapi masih terdapat hambatan merealisasikan praktik kebijakan ekonomi Syari'ah di Indonesia padahal Indonesia bukan merupakan suatu negara yang berbasis negara Islam. Bentuk instrument salah satunya yakni dengan menyelesaikan dan menangani hambatan atau kendala tersebut, yang seharusnya dukungan dari pemerintah, dalam konteks regulasi, kebijakan dan peraturan lainnya. Untuk mengembangkan bisnis ekonomi syari'ah ini tidak dapat lepas dari peranan *quadruple helix* yaitu adanya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat (Fikriyah & Alam, 2021). Peranan pemerintah, melalui penyusunan kebijakan atau aturan *legal standing* sehingga dapat dijadikan acuan untuk memperkuat ekosistem bisnis yang menggunakan konsep Syari'ah.

Iswanaji *et al.*, (2021) menyatakan bahwa kebijakan dasar yang sudah berjalan dalam menjalankan bisnis syari'ah bagi lembaga keuangan atau badan usaha bisnis dalam menghimpun tabungan, pendanaan, investasi atau pergerakan keuangan maupun penyediaan permodalan bagi dunia usaha. Secara keseluruhan pelaksanaannya tidak mengenal riba, tetapi merealisasikan sistem bagi hasil bagi seluruh pengguna. Bagi hasil yang dimaksud adalah sebagai total keuntungan pada modal akan dibagi antara kedua belah pihak secara adil dan sesuai dengan kesepakatan. Riba dalam konsep syari'ah berarti nilai tambahan yang diharamkan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun. Diharamkannya antara yang berhutang dan yang memberikan piutang dengan memberikan bunga, menyebabkan beberapa kalangan tertentu secara indikasi psikologis ekonomi (Mujahidin, 2017).

Kekuatan masyarakat dalam ketertarikannya mempraktikkan bisnis atau ekonomi syari'ah menjadi bentuk dukungan yang cukup kuat untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi syari'ah di Indonesia. Namun perlu dianalisis terkait hal-hal yang mendasari preferensi perilaku ekonomi masyarakat dalam memilih bisnis ekonomi syari'ah seperti investasi keuangan di perbankan syari'ah, *fintech* syari'ah, penginapan syari'ah dan sebagainya. Saat ini praktik kebijakan maupun bisnis ekonomi syari'ah di Indonesia masih belum optimal, masih bisa ditingkatkan dengan melakukan sosialisasi bahwa di Indonesia ekonomi syari'ah memiliki prospek yang baik (Larasati & Kahfi, 2020). Belum optimalnya praktik ekonomi syari'ah di Indonesia terjadi karena belum maksimalnya sinergi maupun kolaborasi dari berbagai lembaga keuangan syari'ah, termasuk juga sinergi dari lembaga sosial lainnya. Bahkan sinergi dengan sektor pemberdayaan maupun pengembangan ekonomi umat, regulasi ekonomi syari'ah juga belum kokoh sehingga menjadi hambatan yang perlu dipecahkan. Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia masih bergantung dari kekuatan bersama dari semua pihak di antaranya pemerintah selaku regulator pemegang kebijakan, pihak swasta atau dunia usaha, pihak akademisi, beserta masyarakat sebagai pihak-pihak yang akan menjalankan kebijakan maupun praktik ekonomi syari'ah (Fikriyah & Alam, 2021).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang mengacu pada bentuk analisis kritis yang keseluruhan analisis diperoleh berdasarkan studi kepustakaan (Pakpahan et al., 2022). Digunakannya paradigma analisis kritis mengungkapkan dan menganalisis realitas sosial yang membahas terkait ketimpangan relasi sosial yang sedang berlangsung. Analisis kritis ini bersumber dari perspektif teori kritis dengan asumsi yang dikonstruksinya. Analisis kritis ini berorientasi berdasarkan pemecahan masalah, *problem solving* atas gejala perubahan sosial yang terjadi.

Sementara studi kepustakaan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis sumber data sekunder yang didapat dari hasil penelitian, artikel jurnal, dan buku-buku referensi yang membahas tema atau topik yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi saat ini penelitian terkait dengan analisis kritis terbentuknya paradigma ekonomi syari'ah berdasarkan prinsip ekonomi dalam agama Islam, saat ini belum banyak dilakukan. Dalam proses *critical review* ini akan melihat dan menganalisis preferensi perilaku ekonomi masyarakat terhadap implementasi konsep syari'ah yang secara khusus dipandang dalam konteks psikologis ekonomi. Pada nantinya hal tersebut yang akan menjadi dasar pemilihan prinsip syari'ah dalam menjamurnya usaha, permodalan, perbankan dan investasi yang menggunakan konsep syari'ah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan ekonomi syari'ah secara umum bagi masyarakat mengandung makna bahwa secara konseptual telah memenuhi tuntutan zaman perkembangan bisnis dan merupakan kewajiban historisnya untuk dilahirkan kembali bahkan dapat dikembangkan menjadi sistem keuangan alternatif dan bersifat solutif. Bisnis keuangan syari'ah di Indonesia telah dikenal sebagai bentuk preferensi perilaku ekonomi yang dipilih dan sudah mulai diterapkan oleh masyarakat. Berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia awalnya ditandai atas berdirinya lembaga keuangan syari'ah. Inisiatif mendirikan Bank syari'ah di negara Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui pembahasan yang bertema bank syari'ah sebagai pilar ekonomi syari'ah (Novimaimory, 2018). Fokus utama yang menjadi daya tarik utama bisnis syari'ah saat ini adalah perbankan. Perkembangan sistem keuangan dan perbankan syari'ah di Indonesia sudah mengalami kemajuan penting, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur pendukung terealisasinya bisnis. Kemajuan tersebut terlihat pada perangkat regulasi, dan sistem monitoring, serta literasi masyarakat dalam jasa keuangan syari'ah. Bank Indonesia pada tahun 2002 memberikan kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan *blue print* pengembangan Perbankan Syari'ah di Indonesia seperti API dan ASKI serta kebijakan internasional. Praktik terbaik yang dirumuskan oleh lembaga keuangan Islam internasional, misal IFSB (*Islamic Finacial Services Board*). Dalam perumusan kebijakan tersebut, berbagai macam aspek sudah dipertimbangkan secara komprehensif, berupa kondisi aktual ekosistem perbankan syari'ah nasional dan instrumen terkait. *Trend* perkembangan perbankan syari'ah secara nasional mulai terwujud dan tidak terlepas dari kondisi keuangan lebih makro (Mardi, 2021). Aktivitas keuangan syari'ah di Indonesia sudah tumbuh lebih dari dua dekade sejak mulai berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syari'ah pertama yang menerapkan prinsip Syari'ah. Perkembangan perbankan syari'ah saat ini, sudah menghasilkan bermacam progress, mulai dari semakin banyaknya produk dan layanan sampai pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung perkembangan syari'ah di Indonesia (Hardani, 2019).

Sementara berkaitan dengan IKNB syari'ah di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan *hig benefit* terhadap sistem perekonomian nasional. IKNB berbasis syari'ah telah menjadi pilar kekuatan dalam industri keuangan syari'ah, dalam perkembangannya diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan ekonomi syari'ah di Indonesia. Selanjutnya jika berbicara dalam koteksindustri perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan, dan layanan lainnya IKNB syari'ah dalam pelaksanaannya tidak bertentangan pada aturan dari hukum ekonomi syari'ah di Indonesia. Kegiatan IKNB syari'ah secara umum tidak ada bedanya pada IKNB konvensional (Fikriyah & Alam, 2021). Namun memiliki ciri khusus, pada produk dan

mekanisme transaksi berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syari'ah. Untuk melihat keberadaan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah dalam perekonomian di Indonesia dapat dilihat bahwa selain Perbankan syari'ah dan IKNB Syari'ah juga terdapat pasar modal syari'ah dan keuangan syari'ah lainnya yang sudah berkembang. Perkembangan pasar modal syari'ah di negara Indonesia juga disebabkan oleh kegiatan halal ini yaitu kegiatan jual beli surat berharga, saham, merupakan kegiatan *muamalah* sehingga transaksi yang tersedia di pasar modal diperbolehkan selama tidak terdapat larangan menurut prinsip syari'ah (Hartati, 2021).

Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya memeluk Islam saat ini sudah memulai *trend* pergeseran menggunakan perbankan konvensional ke arah penggunaan lembaga keuangan atau perbankan yang menerapkan sistem pengelolaan dengan prinsip syari'ah (Cindi et al., 2022). Munculnya bisnis keuangan syari'ah di Indonesia menegaskan bahwa secara bisnis proses sudah bisa bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai contoh saat ini sudah banyak bank dengan konsep Syari'ah sudah sejajar dengan bank konvensional yang mirip penerapannya dengan IKNB Syari'ah.

Keberadaan perekonomian yang menerapkan prinsip syari'ah dapat terlihat secara utuh yang tercermin dari struktur kelembagaan, substansi proses bisnis, dan budaya pengelolaannya. Sistem tersebut apabila diamati dari konteks struktur dari lembaga regulasi yang terdapat di dalamnya antara lain Peradilan Agama, Majelis Syari'ah Nasional (MSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan sebagainya. Berdasarkan substansinya dapat terlihat dari produk regulasi maupun fatwa tentang bisnis atau keuangan syari'ah, seperti Undang-Undang perbankan syari'ah, regulasi bisnis syari'ah dan budaya pengelolaan yang mengedepankan nilai Islam. Kedudukan hukum ekonomi syari'ah di Indonesia khususnya melihat perkembangan budaya global dan peningkatan persaingan bisnis yang berbasis teknologi informasi yang memiliki dampak terhadap berbagai aktivitas kehidupan. Salah satu dampak budaya global juga ditandai dengan adanya konsep ekonomi yang cenderung mengekspansi dan mendominasi persaingan pasar global (Dedi, 2019). Menurut Wartoyo (2021) ekonomi syari'ah sebenarnya sudah mendapatkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat khususnya yang memahami konteks ajaran Islam dalam merealisasikan pilihannya untuk menguatkan nilai Islam dalam menjalankan bisnis maupun mengelola keuangan. Konsep ekonomi syari'ah yang tidak hanya menjelaskan secara individu secara sosial tetapi makna seorang manusia dalam menjalankan nilai Islam yang berkeadilan.

Ekonomi syari'ah diimplementasikan dengan mengedepankan nilai Islam yang dalam penerapannya bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Secara sumber hukum ekonomi syari'ah dilandaskan pada hukum Islam yang artinya sudah menjadi sumber hukum nasional bersama dengan hukum adat (Mardi, 2021). Sifat hukum tersebut tidak berarti harus berlaku secara hukum

formal tetapi bisa bentuk kesadaran yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber hukum tersebut harus bermaksana sebagai sumber hukum bersifat materiil yang berarti mengandung muatan materi terhadap sumber hukum yang bersifat formal. Ekonomi syari'ah perlu diselaraskan dalam posisi politik di Indonesia dengan lebih digaungkan melalui kekuatan regulasi bebragai bisnis yang dapat menggunakan konsep syari'ah. Tujuannya supaya industri keuangan dan bisnis syari'ah yang diminati oleh masyarakat yang merupakan mayoritas pemeluk Islam, dapat lebih berkembang serta dapat menunjukkan pertumbuhan yang maksimal (Syamsuri et al., 2021). Pemerintah sebagai pemegang regulator dalam menyusun kebijakan dapat mendukung pertumbuhan berbagai Lembaga Keuangan syari'ah (LKS), *fintech* Syari'ah, koperasi syari'ah dan bisnis lainnya yang ada di Indonesia.

Di satu sisi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan masyarakat yang semakin cakap menggunakan teknologi menyebabkan industri keuangan juga bertransformasi memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan pengguna dari *smartphone* maupun internet menjadi indikator bahwa bisnis keuangan dan transaksi keuangan juga harus ikut bertansformasi. Momentum ini menjadi peluang yang dimanfaatkan oleh semua sektor industri keuangan mengembangkan sistem transaksi digital baik lembaga keuangan konvensional maupun syari'ah. Maka dari itu perlu adanya keberanian bagi pemegang kebijakan untuk mengembangkan produk keuangan digital salah satunya *fintech* maupun aplikasi keuangan. Kendala yang dihadapi dalam praktik keuangan syari'ah berbasis *fintech*, yakni diantaranya instrumen kebijakan belum sepenuhnya menjamin proses kerja *fintech* dari hulu ke hilir bisa selaras aplikasinya, kesesuaian bisnis proses dengan prinsip syari'ah seharusnya bisa mengkemasdan mengembangkan sistem keuangan digital maupun *fintech* dengan baik. Melalui penguatan ekosistem keuangan digital, ekonomi syari'ah tentu saja dapat menempatkan diri secara strategis sehingga menjadi pilihan preferensi ekonomi masyarakat.

Prinsip ekonomi syari'ah telah memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengelolaan *zakat*, *infaq* maupun sedekah sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih makmur (Jureid, 2020). Sistem ekonomi syari'ah sesungguhnya melarang setiap individu dengan alasan apapun untuk menumpuk kekayaan, tetapi tidak mendistribusikannya secara lebih lanjut. Apabila tidak terdistribusi dengan baik maka akan menghambat jalannya perekonomian suatu negara (Aji & Mukri, 2020). Seorang muslim mempunyai kewajiban untuk mencegah penguasaan harta dan mengeksploitasi bisnis secara berlebihan seperti dalam bentuk kapitalisme maupun oligarki. Prinsip ekonomi syari'ah senantiasa berupaya mencegah perilaku yang berbentuk seperti hal tersebut, maka dari itu prinsip syari'ah mengajurkan kepada seluruh umat agar mendistribusikan kekayaan mereka melalui proses bisnis yang berkeadilan. Proses bisnis ini yang menjadi nilai psikologis ekonomi yang

mampu menciptakan *kemaslahatan* kehidupan pelaku usaha, sehingga optimalisasi bisnis sangat ditentukan oleh aturan yang sudah tercantum dalam ajaran Islam.

Sistem ekonomi syari'ah di masyarakat selain mempengaruhi psikologis ekonomi para pelaku usaha yang telah memahaminya, juga menciptakan kondisi ekonomi yang aman dari eksploitasi dan diskriminasi (Aji & Mukri, 2020). Ekonomi syari'ah dalam bisnis prosesnya telah menyediakan seperangkat sistem tentang pembinaan pribadi, interaksi dan prinsip penerapan, serta ruang untuk mengembangkan perekonomian dengan segala instrumen kebijakan, kelembagaan dan aspek hukum pembangunan, pengendalian, dan pengawasan. Adapun persepsi masyarakat atas bank syari'ah bahwa sebagian besar menerima dengan baik adanya bank syari'ah yang mampu menerapkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syari'ah Islam (Hutagalung, 2019). Masyarakat juga berpendapat bahwa keberadaan bank syari'ah yang berbeda dari sistem perbankan konvensional yang lebih memperhatikan distribusi keuntungan secara merata. Selain itu sebagian masyarakat juga memiliki pandangan bahwa perbankan syari'ah sama halnya dengan bank konvensional hanya saja perbedaannya terletak pada penamaan dan jenis bank saja, dimana bank syari'ah mengatas namakan syari'ah Islam namun sistem didalamnya tetap sama dengan bank konvensional (Yunita, 2018).

Menurut Joni et al., (2022) kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pengelolaan keuangan dan bisnis ke dalam konteks keadilan berlandaskan prinsip syari'ah semakin kuat dan membumi. Penguatan tersebut misalnya pada sektor perekonomian maupun keuangan Islam. Perkembangan pada sektor ini dapat memunculkan fenomena maraknya bentuk sistem dan model interaksi pengelolaan lembaga keuangan, seperti perbankan syari'ah, koperasi syari'ah, asuransi syari'ah, pegadaian syari'ah. Para praktisi ekonomi syari'ah seharusnya segera memusatkan perhatian dan mampu mengembangkan bisnis syari'ah beberapa sektor antara lain sektor industri, perniagaan praktis, sektor riil maupun semisial (Iskandar & Aqbar, 2019). Melalui strategi tersebut preferensi pilihan ekonomi masyarakat dapat fokus ke syari'ah guna mencegah adanya eksploitasi bisnis yang bersifat oligarki. Sebagaimana dalam firman Allah yang sudah sering didengar yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 tersebut menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada umat muslim melakukan perkara-perkara yang halal dan menjauhi perkara yang dilarang agama ketika interaksi bersama orang lain. Menjamurnya bisnis ekonomi berbasis syari'ah tidak lain bahwa prinsipnya yang memberikan khazanah kepada seluruh umat muslim dengan melaksanakan perdagangan yang halal dan menjauhi perilaku-perilaku riba menyebabkan pilihan utama dalam membentuk preferensi perilaku ekonomi saat ini. Konsep riba ini bersifat

rakus yang memberikan keuntungan sepihak Saja yang tidak berlandaskan dengan tata tertib yang tertuang dalam Alquran dan ajaran Islam.

Elemen-elemen yang ada di ekonomi syari'ah sesuai dengan ajaran agama Islam terputus menganut pada ajaran Al-Qur'an. Dengan landasan ini diharapkan memberikan suatu pemanfaatan besar bagi para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan semakin mudah. Dalam konteks perbankan ekonomi syariah mulai menjadi pilihan dikarenakan dengan melaksanakan konsep ini ada dampak-dampak yang baik yang bisa dinikmati secara bersama-sama tentunya disertai dengan kehalalan (Aji & Mukri, 2020). Landasan ekonomi syariah sebagai lembaga yang memberikan keharmonisan dalam bentuk pelayanan yang baik kepada setiap para nasabahnya. Bahkan *trend* saat ini berbagai kegiatan usaha lainnya seperti *fintech*, investasi bahkan sistem usaha sudah menyasarkan konsep syari'ah. Hal tersebut membuktikan bahwa secara psikologis nilai ekonomi syari'ah menjadi pilihan bagi masyarakat muslim. Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bahwa ekonomi syari'ah memiliki jenis akad yang bisa menjamin setiap nasabah. Ekonomi syari'ah pada masa yang akan datang tentunya akan menjadi pedoman bagi semuanya.

Berdasarkan hal tersebut hadirnya ekonomi syari'ah di Indonesia sebagai suatu solusi khususnya kepada seluruh umat manusia di wilayah negara Indonesia dalam melaksanakan bisnis ataupun juga referensi dalam rangka pengembangan-pengembangan usaha (Fikriyah & Alam, 2021). Ekonomi syari'ah memiliki perbedaan jika disandingkan dengan jenis konvensional yang sangat fokus terhadap profit semata, namun melupakan makna keadilan. Maka dari itu secara psikologis bahwa ekonomi syari'ah dapat menjauhkan pelaku ekonomi dari praktik-praktik yang dilarang dalam ajaran Islam. Praktik ekonomi syari'ah ini juga berdampak menghindarkan pelaku usaha untuk tidak mengajukan pinjaman modal terhadap rentenir dengan bunga besar (Iswanaji et al., 2021). Hal inilah yang menjadi keistimewaan nilai ekonomi syari'ah yang perlu dikembangkan kembali oleh setiap pelaku ekonomi di Indonesia

SIMPULAN

Perkembangan ekonomi syari'ah telah berkembang secara konseptual dan dapat dijadikan sebagai preferensi pilihan ekonomi masyarakat khususnya muslim. Lembaga keuangan yang memfokuskan diri kepada konteks syariah sebagai bukti Indonesia mengembangkan sayapnya dengan memunculkan bank tersebut dengan sistem syari'ah. Beberapa poros yang dilaksanakan diantaranya perbankan syari'ah, pasar modal syari'ah, IKNB syari'ah, dan *fintech* syari'ah. Ekonomi berlandaskan Islam memiliki potensi kuat sebagai kekuatan terhadap sistem perekonomian nasional. Selain itu praktik ekonomi syari'ah juga diharapkan seiring dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat khususnya pada kebutuhan keuangan bisa melaksanakan tugas-tugasnya menyelesaikan seluruh problem kebutuhan manusia. Ekonomi

yang berlandaskan Islam ini setidaknya harus bisa menyelesaikan pemulihan ekonomi baik tingkat masyarakat hingga tingkat nasional. Memaksimalkan momentum pemulihan ekonomi nasional, justru dukungan masyarakat muslim untuk memperkuat posisi ekonomi syari'ah dengan memastikan menjadi pilihan utama dalam menjalankan bisnis atau pengelolaan keuangan berbasis syari'ah.

Kepercayaan pemilihan preferensi ekonomi oleh perilaku masyarakat akan membawa manfaat positif dalam khususnya memperkuat Perekonomian yang dimiliki oleh rakyat, tumpang tindihnya ekonomi yang tidak merata serta mampu meminimalisir ekonomi lemah yang dimiliki oleh masyarakat. Lembaga ekonomi yang berlandaskan Islam ini setidaknya menyamakan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang dilandasi dengan perilaku moral berkaitan dengan agama hingga akhirnya ekonomi syari'ah menjadi preferensi perilaku ekonomi bagi masyarakat karena adanya faktor kepercayaan (*trust*), keinginan melaksanakan bisnis yang sesuai ajaran Islam. Termasuk sudah sesuai dengan kultur adat dan budaya kita yang diaplikasikan kedalam kejujuran, pemerataan dan keadilan, maupun tolong-menolong. Selain itu tingkat kepercayaan itu terbentuk karena ada keberpihakan pada kelompok usaha lemah yang membutuhkan sinergi bersama.

BIBLIOGRAFY

- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020*. Deepublish.
- Astuti, D. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(1), 13–26.
- Cindi, C. N. S., Fasa, M. I. F. M. I., Suharto, S., & Fachri, A. F. A. (2022). Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 21–40.
- Dedi, A. (2019). Negara-Negara Berkembang Dalam Pusaran Politik Globalisasi Dunia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 15–26.
- Fikriyah, K., & Alam, W. Y. (2021). Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1594–1601.
- Hardani, S. (2019). Pengembangan Sistem Informasi KPR Syariah dengan Metode Scrum. *JITK (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer)*, 4(2), 223–230.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31–48.

-
- Hutagalung, M. A. K. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap minat masyarakat menjadi nasabah bank syari'ah. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(2), 228–239.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(1), 39–53.
- Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'Hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.
- Joni, Y., Awaluddin, A., Adella, S., & Anggraini, R. (2022). Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1866–1876.
- Jureid, J. (2020). Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pada Era COVID-19. *JEpa*, 5(2), 224–236.
- Larasati, R. A., & Kahfi, I. (2020). Analisis Perkembangan Perbankan Syari'ah Sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi Muslim. *JURNAL SERAMBI ILMU*, 21(2), 185–199.
- Mardi, M. (2021). Ekonomi Syariah: Eksistensi dan Kedudukannya di Indonesia. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 20–32.
- Mujahidin, A. (2017). Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(2), 153–168.
- Novimaimory, A. A. (2018). Sejarah Lahirnya Bank Syariah Serta Praktek di Dunia Perbankan. *Jurnal Pahlawan*, 1(2), 15–21.
- Pakpahan, M., Amruddin, A., Sihombing, R. M., Siagian, V., Kuswandi, S., Arifin, R., Mukhoirotin, M., Karwanto, K., Tasrim, I. W., & Kato, I. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yayasan Kita Menulis.
- Ramadhan, M. (2018). *Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional* (1st ed.). LkiS.
- Rustandi, H. N., SH, M. H., Imam Asrofi, S. E. I., & Jamil, H. I. (2021). *Politik dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia Era Reformasi* (Pertama). EDU PUBLISHER.
- Syamsuri, S., Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal, J. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1705–1716.
-

Wartoyo, W. (2021). AKSELERASI PETUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DALAM KONTEKS POLITIK EKONOMI DI INDONESIA. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).

Yunita, A. (2018). Problematika Penyertaan Akad Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. *Varia Justicia*, 14(1), 21–29.